



RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LAMURU
TAHUN 2022



KANTOR CAMAT LAMURU
KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr, Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya juaah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Lamuru Tahun 2022, shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lamuru ini adalah merupakan media Kecamatan Lamuru dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian mengenai pelaksanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan di daerah Kecamatan Lamuru yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan.

Disamping itu Renja ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisahkan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang di terima masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lamuru sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah Kabupaten Bone secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lamuru sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya Renja ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lamuru selama Tahun 2022, melalui Renja ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Demikian kiranya Rencan Kerja Pemerintah Kecamatan Lamuru, dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih.

Wassalam.

Lalebata, 1 Januari 2022

Camat Lamuru,



RAMLI MARSUKI, S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19650711 198611 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.....	20
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten.....	29
3.2. Telaahan Renstra	30
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN.....	32
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021	8
Tabel 2.	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2021.....	14
Tabel 3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lamuru	17
Tabel 4	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Tabel 5	Identifikasi Kebijakan Nasional	29
Tabel 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2022.....	32

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Lamuru, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Lamuru dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Lamuru memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lamuru serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Lamuru secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Kecamatan dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima)pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan, Top - Down dan Bottom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lamuru Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021, Renstra Kecamatan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Lamuru adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- 32) Keputusan Kepala OPD Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Nomor ... /KPTS/KMO/V/2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lamuru Tahun 2022, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNMENT** .

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lamuru tahun 2022 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2022 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lamuru.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renja serta serta Sistematika Penulisan Renja Kecamatan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan, pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan dan / atau realisasi APBD untuk Kecamatan yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan, Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Kecamatan, serta ketentuan peranan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika Kecamatan bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Kecamatan perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan Kecamatan yang bersangkutan.

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan, Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan, Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional. **3.2 Telaahan Renstra**, Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan. **3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan**, Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup. Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU.****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan.**

Kecamatan Lamuru telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2013 – 2018 telah dilaksanakan dengan baik adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi renstra Kecamatan Lamuru yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan sampai dengan tahun berjalan :

Tabel 1 : T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan														
Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2021														
Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Sulawesi Selatan														
Nama Perangkat Daerah : KANTOR CAMAT LAMURU														
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (%)								
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan (Dokumen)	7	7	5	5	100 %	5	5	92 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)								

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi per bulan ASN Perangkat Daerah (Bulan)	12	12	12	12	100 %	12	12	96,7 %
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK) penunjang administrasi sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	60	1	1	100 %	1	1	87 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan rapat sesuai rencana kebutuhan (Paket)	2	2	2	2	100 %	2	2	96,4 %
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	1	1	1	100 %	1	1	99,8 %
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	1	1	1	100 %	1	1	76,2 %
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi	120	120	120	120	100 %	12	10	97,2 %

					dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan tupoksi organisasi yang diikuti (Kegiatan)								
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)								
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan (Unit)	3	3	3	3	100 %	3	3	100 %
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	3	3	3	100 %	4	3	82,6 %
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)								
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	36	36	36	36	100 %	36	36	76,5 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	72	72	72	72	100 %	72	72	100 %

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (Unit)	1	1	1	1	100 %	1	1	75,6 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (Unit)	4	4	4	4	100 %	4	4	96,6 %
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	4	4	4	4	100 %	1	1	54,8 %
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Diikuti dan Dilaksanakan (%)								
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Musrembang Di	0	0	1	1	100 %	1	1	86,9 %

					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan (Kegiatan)								
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan								
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)								
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Lalebata (Kegiatan)	2	2	2	2	100 %	2	2	100 %
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)								
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	36	36	36	36	100 %	36	36	97,5 %

					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(Orang)								
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa								
7	01	04	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)								
7	01	04	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Desa)	11	11	11	11	100 %	11	11	93,4 %

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 2 : Realisasi Program/Kegiatan tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROSENTASE
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sub. Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan	5 Dokumne	5 Dokumen	92%
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	96,7%
	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	87%
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan makanan dan minuman	2 Paket	2 Paket	96,4%
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	99,8%
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Paket	1 Paket	76,2%
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi	12 Kagiatan	10 Kagiatan	97,2%
	8. Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	3 Unit	3 Unit	100%
	9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	3 Unit	82,6%
	10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya	36 Rekening (Data Internet, Air dan Listrik)	36 Rekening (Data Internet, Listrik dan Air)	76,5%

		Air dan Listrik			
	11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran gaji/upah tenaga administrasi	72 Orang	72 Orang	100%
	12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	1 Unit	75,6%
	13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 Unit Mobil, 3 Unit Motor	1 Unit Mobil, 3 Unit Motor	96,6%
	14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	1 paket	54,8%
2	Program : Progran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Musrebang di Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kagiatan	86,9%
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub. Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah yang mendapatkan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
4	Program: Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub. Kegiatan : 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah operasional pengawasan Tripika	36 Orang	36 Orang	97,5%
5	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	11 Desa	11 Desa	93,4%

3. Realisasi Program/Kegiatan yang direncanakan baru terlaksana sekitar 89,4%
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.

Program/Kegiatan selama 12 bulan telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor penyebabnya adalah kurangnya SDM (personil) di Kecamatan Lamuru.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan.
Target capaian program Renstra tahun 2018 – 2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja)
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Lamuru tahun 2021, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Lamuru merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamuru.

Tabel 3 : T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Lamuru
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Sekretariat												
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.			Jumlah Surat Masuk	300	315	412	392	361	413	450	400	
			Jumlah Surat Keluar	518	412	405	380	296	310	350	300	
			Jumlah Buku Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
			Jumlah Buku Laporan Keuangan semesteran yang tersusun	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	
			Jumlah Buku Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	
			Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Meningkatnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kecamatan			Jumlah Rapat Staf									
			Jumlah Apel Pagi – Siang									
3. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	-	-	-	-	-	-			
Bidang Seksi Pemerintahan												
1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral			Jumlah Rapat koordinasi Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa/ Kelurahan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali			
2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali			
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan bulanan Kependudukan	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap			

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4. Meningkatkan Pelayanan Publik			Jumlah Pelayanan KTP	-	-	-	-	627	333	370	400	
			Jumlah Pelayanan KK	-	-	-	-	420	311	350	350	
			Jumlah Pelayanan Akte Lahir	-	-	-	-	120	117	130	125	
5. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	100%	100%	
Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Lomba-lomba tingkat Kecamatan Kabupaten dan Propinsi yang diikuti	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan			Jumlah kegiatan Musrembang Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lamuru adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Lamuru dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Lamuru.
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Lamuru sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lamuru.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Lamuru, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Bone.
 - d. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lamuru sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Lamuru terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan.

Tantangan :

 - a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Wear – Hawear) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
 - b. Jaringan internet yg sering bermasalah sehingga menghambat proses pelayanan;
 - c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
 - d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
 - e. Perubahan KTP menjadi e-KTP di Kecamatan Lamuru saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e-KTP tidak bisa dioperasikan secara maksimal dikarenakan perangkat (alat perekaman) dan jaringan internet sering mengalami gangguan sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bone maupun di Kecamatan terdekat dan diberi pengantar dari Kecamatan Lamuru.
 - f. Pemohon yang akan mengurus KK, Surat Pindah, e-KTP dan pengurusan dokumen lainnya di wilayah Kecamatan Lamuru cukup banyak,

sedangkan perangkat komputer hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Lamuru terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Musrenbang tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kecamatan Lamuru mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

- c. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Lamuru, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Lamuru dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Lamuru melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Lamuru melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, toko Pemuda, dan Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan.

Tabel 4. T-C.32.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : KANTOR CAMAT LAMURU

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
=>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Lamuru	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lamuru	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beseeta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	12 Laporan	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Kec. Lamuru	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	APBD

	Milik daerah SKPD				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lamuru	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lamuru	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lamuru	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan rapat sesuai rencana kebutuhan	2 Paket	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lamuru	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Lamuru	Jumlah media yang dibayarkan sesuai rencana kebutuhan per bulan	1 Media	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lamuru	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang diikuti	45 Kegiatan	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Pengadaan Mebel	Kec. Lamuru	Jumlah pengadaan mebel kantor sesuai rencana kebutuhan	7 Unit	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil	100 %	

	Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lamuru	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan	36 Rekening	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lamuru	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan tenaga administrasi/tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lamuru	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lamuru	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lamuru	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 Unit	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lamuru	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan	14 Unit	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lamuru	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	APBD
=>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Lamuru	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	

9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lamuru	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100 %	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lamuru	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang di Kecamatan	1 Kegiatan	APBD
=>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Lamuru	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	100 %	
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Lamuru	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lamuru	Jumlah pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Lamuru	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lamuru	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	3 Kegiatan	APBD
=>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Lamuru	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 %	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lamuru	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kec. Lamuru	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	36 Kegiatan	APBD

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
=>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Lamuru	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa	100 %	
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lamuru	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Lamuru	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Desa	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lamuru antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2022 oleh Kecamatan Lamuru adalah :

Tabel 5.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bone

A. URUSAN WAJIB

1. Perencanaan Pembangunan

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Perencanaan Pembangunan	-	-
	Jumlah	-	-

2. Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	-
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-
	Jumlah	-	-

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	-	-
2	Program Pemeliharaan Kantibmas	-	-
	Jumlah	-	-

4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	1	1
2	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah daerah	1	1
3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	1	1
	Jumlah	3	3

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	1
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	1	1
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan	-	1

	Jumlah	2	3
--	--------	---	---

3.2. Telaahan Restra

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

yaitu **“mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”**

Dalam rangka mendukung percepatan misi ke-4 ditetapkan tujuan :

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan”

serta 4 (empat) sasaran strategis, sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah “Meningkatnya Publik di Kecamatan”.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Lamuru tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan :

Menaikkan taraf hidup masyarakat Kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Sasaran :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
- 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 - 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 - 3. Program dan Kegiatan dibidang Pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa/Kelurahan se Kecamatan Lamuru.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2021
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah

disahkan, sedangkan program lain dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau pada tahun mendatang.

d. Tabel Rencana dan Program :

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Tabel 6. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : KANTOR CAMAT LAMURU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	KEC. LAMURU	100%	8.512.521.312	APBD	APBD Kab.	100%	9.363.533.443
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	KEC. LAMURU	100%	26.228.770	APBD	APBD Kab.	100%	28.851.647
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	KEC. LAMURU	5	26.228.770	APBD	APBD Kab.	5	28.851.647
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC. LAMURU	100%	8.066.898.162	APBD	APBD Kab.	100%	8.873.587.978

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR CAMAT LAMURU

Januari
1, 2022

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (Laporan)	KEC. LAMURU	12	8.066.898.162	APBD	APBD Kab.	12	8.873.587.978
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ihktisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEC. LAMURU	100%	16.800.000	APBD	APBD Kab.	100%	18.480.000
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (Laporan)	KEC. LAMURU	1	16.800.000	APBD	APBD Kab.	1	18.480.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ihktisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEC. LAMURU	100%	38.050.000	APBD	APBD Kab.	100%	41.855.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (Paket)	KEC. LAMURU	1	38.050.000	APBD	APBD Kab.	1	41.855.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ihktisar Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC. LAMURU	100%	118.031.900	APBD	APBD Kab.	100%	129.595.090
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	KEC. LAMURU	1	14.064.500	APBD	APBD Kab.	1	15.470.950
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan rapat sesuai rencana kebutuhan (Paket)	KEC. LAMURU	2	45.941.750	APBD	APBD Kab.	2	50.535.925
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	KEC. LAMURU	1	4.465.650	APBD	APBD Kab.	1	4.912.215

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR CAMAT LAMURU

Januari
1, 2022

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media yang dibayarkan sesuai rencana kebutuhan per bulan (Media)	KEC. LAMURU	1	2.400.000	APBD	APBD Kab.	1	2.400.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang diikuti (Kegiatan)	KEC. LAMURU	45	51.160.000	APBD	APBD Kab.	20	56.276.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KEC. LAMURU	100%	18.375.000	APBD	APBD Kab.	100%	20.212.500
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor sesuai rencana kebutuhan (Unit)	KEC. LAMURU	7	18.375.000	APBD	APBD Kab.	1	20.212.500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. LAMURU	100%	129.328.880	APBD	APBD Kab.	100%	142.261.768
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	KEC. LAMURU	36	22.084.880	APBD	APBD Kab.	36	24.293.368
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	KEC. LAMURU	12	107.244.000	APBD	APBD Kab.	96	117.968.400

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. LAMURU	100%	98.808.600	APBD	APBD Kab.	100%	108.689.460
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (Unit)	KEC. LAMURU	1	38.260.000	APBD	APBD Kab.	1	42.086.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (Unit)	KEC. LAMURU	5	36.950.000	APBD	APBD Kab.	5	40.645.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan (Unit)	KEC. LAMURU	14	7.900.000	APBD	APBD Kab.	8	8.690.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	KEC. LAMURU	1	15.698.600	APBD	APBD Kab.	1	17.268.460
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik	KEC. LAMURU	100%	15.950.000	APBD	APBD Kab.	100%	17.545.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Diikuti dan Dilaksanakan	KEC. LAMURU	100%	15.950.000	APBD	APBD Kab.	100%	17.545.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan kegiatan musrembang di Kecamatan (Kegiatan)	KEC. LAMURU	1	15.950.000	APBD	APBD Kab.	1	17.545.000

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	KEC. LAMURI	100%	165.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	181.500.000
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. LAMURU	100%	15.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	16.500.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (Kegiatan)	KEC. LAMURU	1	15.000.000	APBD	APBD Kab.	1	16.500.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KEC. LAMURU	100%	150.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	165.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Kegiatan)	KEC. LAMURU	3	150.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	165.000.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	KEC. LAMURU	100%	27.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	29.700.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEC. LAMURU	100%	27.000.000	APBD	APBD Kab.	100%	29.700.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kegiatan)	KEC. LAMURU	36	27.000.000	APBD	APBD Kab.	36	29.700.000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa	KEC. LAMURU	100%	24.464.850	APBD	APBD Kab.	100%	26.911.335
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. LAMURU	100%	24.464.850	APBD	APBD Kab.	100%	26.911.335

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR CAMAT LAMURU

Januari
1, 2022

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Desa)	KEC. LAMURU	11	24.464.850	APBD	APBD Kab.	11	26.911.335
	JUMLAH								8.744.936.162				9.619.189.778

BAB V**PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Lamuru sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Lamuru merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Selain dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Kaidas – kaidas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Lamuru dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Lamuru pada Tahun 2022 mendatang akan menetapkan Program dan Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Lamuru Tahun 2022 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Lamuru Tahun 2022 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Lamuru tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.